

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hubungan historis antara Turki Utsmani dan Hindia Belanda sejatinya telah terjalin lama sebagaimana yang telah dikaji oleh banyak sejarawan. Hubungan historis ini dilatarbelakangi dengan adanya hubungan kenegaraan, baik antara Turki Utsmani dan Indonesia -dalam hal ini berbentuk kesultanan- dalam berbagai bidang. Hubungan kenegaraan ini pada dasarnya dilandasi dengan dasar politik Islam, dimana kesultanan-kesultanan di Nusantara kala itu secara tradisi maupun politis menjadikan posisi khalifah yang saat itu ada di Turki sebagai pemimpin dan pelindung umat Islam sedunia. Dengan posisinya sebagai pemimpin dan pelindung umat Islam, Turki Utsmani melakukan berbagai hal untuk memastikan umat Islam yang tinggal jauh dari wilayahnya mendapatkan perlindungan dan pengakuan sebagai bagian dari kekhalifahan Islam.

Pasca runtuhnya berbagai kesultanan di Nusantara dan Hindia Belanda telah terbentuk, posisi Turki sebagai pemimpin dan pelindung umat Islam tidak begitu saja dilupakan. Dalam kondisi penjajahan, umat Islam Hindia Belanda masih dapat merasakan jejak dan pengaruh Turki Utsmani kala itu walau secara politis-teknis pengaruhnya sudah mulai tidak dirasakan lagi. Posisi Turki Utsmani paling tidak masih mendapat bagian dalam kehidupan beragama umat Islam di Hindia Belanda. Dalam konteks ini, posisi penting Turki Utsmani pada dasarnya

dipupuk dalam jangka waktu yang lama dan akhirnya mengendap di dalam alam bawah sadar umat Islam Hindia Belanda yang nantinya diartikulasikan dengan beragam bentuk. Maka, menjadi tidak aneh ketika Turki Utsmani mengalami permasalahan dan memuncak di awal abad ke-20 M, -secara alamiah pula- umat Islam Hindia Belanda seolah turut pula merasakan permasalahan yang sama.

Di antara banyak dinamika sosial politik di dunia internasional, posisi Turki -disamping Mekah dan Kairo- menjadi penting bagi umat Islam terkait dengan berkembangnya wacana-wacana yang menawarkan arah perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Di Hindia Belanda, wacana Pan-Islam -yang dipropagandakan Abdul Hamid II- menjadi wacana yang berhembus dengan kencang di tengah gejolak sosial politik di Turki Utsmani. Wacana Pan-Islam pula yang semakin menguatkan posisi dan kedudukan kekhalifahan Turki baik secara politis dan juga teologis. Pan-Islam, dapat dikatakan menjadi latar belakang utama umat Islam Hindia Belanda mengarahkan perhatiannya terhadap kondisi Turki Utsmani. Karena itu, ketika terjadi peristiwa penghapusan jabatan khalifah yang erat kaitannya dengan paham Pan-Islam, seketika itu juga hal ini menjadi isu penting bagi dunia Islam yang mengambil wacana Pan-Islam sebagai jalan perjuangan.

Selain itu, di Hindia Belanda, wacana Pan-Islam sendiri memiliki kaitan yang erat dengan pelaksanaan haji. Turki dianggap sebagai pelindung perjalanan haji bagi umat Islam Hindia Belanda, mengingat haji merupakan ibadah penting yang wajib untuk dilakukan umat Islam. Ketika berita mengenai penghapusan kekhalifahan Turki sampai di Hindia Belanda, hal ini mengundang beragam

respon umat Islam di Hindia Belanda. Respon tersebut awalnya sangat berkaitan erat dengan kekhawatiran umat Islam Hindia Belanda akan terhambatnya mereka dalam menunaikan ibadah haji. Namun dalam perkembangannya, wacana Pan-Islam juga ditarik secara politis oleh (elit) Islam sehingga memunculkan respon yang juga politis. Respon politis ini berpuncak pada upaya revitalisasi kekhalifahan. Upaya revitalisasi khilafah merupakan upaya logis dari ketertarikan umat Islam terhadap permasalahan khilafah dimana hal ini muncul dari ketertarikan dan keterikatan umat Islam, baik secara politis dan teologis terhadap posisi khilafah.

Respon ini ditunjukkan dengan pelaksanaan agenda Kongres al-Islam, terutama sekali pada pelaksanaan Kongres al-Islam Luar Biasa tahun 1924 di Surabaya. Kongres ini bertujuan untuk mengirimkan wakil umat Islam Hindia Belanda dalam pelaksanaan Kongres al-Islam dunia yang rencananya akan diadakan di Kairo, Mesir dan beragendakan upaya-upaya dalam merevitalisasi jabatan khalifah. Kongres al-Islam Luar Biasa mampu menghimpun beragam komponen organisasi pergerakan Islam di Hindia Belanda kala itu dalam menyatukan suara dan gerak dalam rangka merevitalisasi kembali kekhalifahan yang telah runtuh di Turki. Kongres ini juga menyedot perhatian luar biasa dari beragam kalangan, termasuk dari pihak pemerintah kolonial. Pendek kata, pelaksanaan Kongres al-Islam Luar Biasa menjadi penanda bahwa umat Islam Hindia Belanda merespon jatuhnya kekhalifahan Turki Utsmani dalam skala yang luas dan tataran konseptual.

Dalam skala yang lebih khusus dan dalam tataran teknis-kongkrit, umat Islam Hindia Belanda merespon keruntuhan Turki Utsmani dengan membentuk sebuah badan khusus yaitu Komite Khilafah. Pembentukan Komite Khilafah dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun daya dan upaya dalam rangka perjuangan revitalisasi kekhilafahan. Dalam perkembangannya, pembentukan Komite Khilafah juga turut meluas hingga ke daerah-daerah. Hal ini menjadi penanda bahwa umat Islam Hindia Belanda turut pula memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan jabatan khalifah.

Tak cukup disitu, penerbitan media massa juga dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan propaganda akan pentingnya keberadaan seorang khalifah kepada khalayak banyak. Media massa yang diterbitkan berupa surat kabar sebagai corong propaganda Pan-Islam dalam kaitannya dengan upaya revitalisasi khilafah. Penerbitan media massa menjadi penting dalam rangka penyebarluasan informasi dan segala hal yang berkaitan dengan Pan-Islam dan upaya revitalisasi khilafah mengingat sifat media massa yang dapat menjangkau segala kalangan dengan lebih masif jika dibandingkan dengan pelaksanaan kongres atau pertemuan-pertemuan. Hal ini juga menandakan adanya kesadaran umat Islam Hindia Belanda untuk menjadikan isu revitalisasi khilafah sebagai isu bersama melalui penyebarluasan informasi.

Dalam beragam respon yang muncul ini, perlu dicatat pula akan keberadaan Sarekat Islam yang berada dalam pimpinan dwitunggal Tjokroaminoto dan Agus Salim yang menjadi organisasi Islam yang memiliki andil besar dalam upaya mobilisasi massa dan isu khilafah di Hindia Belanda.

Sarekat Islamlah yang membawa isu revitalisasi khilafah menjadi isu besar yang menuntut perhatian dari seluruh golongan umat Islam Hindia Belanda.

Di tengah tingginya semangat umat Islam dalam merepon keruntuhan Turki Utsmani, secara luas terjadi dinamika di dunia Islam, terutama dinamika dari kawasan Hijaz. Di Mekah, Ibnu Sa'ud berhasil menggulingkan Syarif Husain dan kemudian menguasai kota Mekah. Di satu sisi peristiwa ini menyadarkan umat Islam Hindia Belanda akan pentingnya keberadaan seorang khalifah dalam menjaga kota suci umat Islam, namun disisi yang lain juga memunculkan friksi dalam internal umat Islam. Hal ini juga ditambah dengan adanya tarik ulur dan persaingan dalam penyelenggaraan Kongres al-Islam dunia yang membuat umat Islam Hindia Belanda terpecah. Kondisi ini kemudian membelokkan arah perjuangan revitalisasi kekhilafahan yang tadinya merupakan agenda bersama menjadi agenda yang eksklusif dan terbatas. Akibatnya menjadi jelas, lama-kelamaan isu revitalisasi khilafah sebagai dampak langsung dari keruntuhan Turki Utsmani mulai ditinggalkan.

Dalam konteks ini pula, keruntuhan Turki Utsmani memunculkan dampak lain, terutama setelah wacana Pan-Islam melalui gagasan revitalisasi khilafah mulai ditinggalkan. Terjadi perpecahan secara langsung di internal umat Islam Hindia Belanda. Perpecahan ini terjadi antara golongan Islam tradisional dengan golongan Islam modern, dan juga antara sesama golongan Islam modern. Perpecahan ini secara umum dilatarbelakangi adanya tarik ulur kepentingan dan juga adanya perbedaan cara pandang atas peristiwa keruntuhan Turki Utsmani.

Dampak selanjutnya yaitu pergeseran citra Turki. Turki sebelumnya dicitrakan sebagai negara yang menjadikan Islam sebagai dasar bernegara. Namun, pasca runtuhnya Turki Utsmani dan dibarengi dengan pendirian Republik Turki, maka Turki dicitrakan sebagai negara yang justru semakin maju setelah memisahkan Islam dalam kehidupan politiknya. Hal inilah yang kemudian juga menimbulkan diskursus mengenai kedudukan Islam dalam kehidupan politik kenegaraan di kalangan umat Islam Hindia Belanda pasca keruntuhan Turki Utsmani. Diskursus mengenai hubungan agama dan negara di Hindia Belanda ini juga memunculkan perbedaan pandangan politik umat Islam Hindia Belanda yang paling tidak terfragmentasi menjadi kelompok tradisional, reformis, dan sekuleris sebagai identitas politiknya.

Diskursus ini sesaat mereda ketika Jepang masuk ke Hindia Belanda. Namun hingga setelahnya dan bahkan dalam konteks reformasi di Indonesia saat ini, diskursus mengenai Islam dan negara belum juga selesai. Penelitian ini dapat mengelaborasi beberapa penelitian kontemporer yang menyangkut tentang dinamika pemikiran hubungan antara Islam dan negara di Indonesia, dan terutama sekali dengan wacana khilafah -yang berarti gagasan transnasional- yang muncul pasca reformasi dimana dalam berbagai rilis mengenai hal tersebut, terdapat arahan yang seolah-olah mengatakan bahwa gagasan transnasional membahayakan dan tidak memiliki akar historis di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pada apa yang telah diungkapkan sebelumnya dalam penelitian ini, penulis perlu untuk memberikan saran berkenaan dengan hasil penelitian tersebut. *Pertama*, bagi para pembaca, pemerhati, pengamat, dan terutama bagi para pemangku kepentingan, wacana revitalisasi khilafah sesungguhnya bukan hal baru dan hal menakutkan dalam diskursus ideologi di zaman keterbukaan seperti saat ini, sehingga tidak perlu memunculkan sikap antipati selama wacana tersebut disampaikan dengan baik dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Kedua, bagi para aktivis Islam baik yang pro maupun kontra, bahwasanya isu khilafah pernah menjadi isu bersama antar umat Islam. Hal ini menjadikan secara konseptual khilafah, -secara luas politik Islam- sebenarnya dapat diterima. Namun begitu, perlu pula memerhatikan bagaimana artikulasinya secara kontekstual.

Ketiga, bagi seluruh pihak agar tidak pula mendiskreditkan Islam ketika menemukan adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam agar tidak muncul pembenaran atas kesalahan yang dilakukan oleh individu tertentu. Dalam hal ini perlu untuk dapat membedakan Islam sebagai sebuah sistem dan individu sebagai pelaksana sistem.

C. Rekomendasi

Penelitian ini masih merupakan gambaran secara umum. Masih terdapat hal-hal yang secara khusus belum tercakup dalam penelitian ini, seperti dinamika

di beberapa kawasan di luar pulau Jawa serta bagaimana respon masyarakat non muslim atas peristiwa ini. Untuk itulah penulis merekomendasikan kepada semua pihak untuk dapat mengembangkan kajian ini dalam cakupan yang lebih holistik dan dari perspektif yang lain.